Copyright © The Author(s) 2027
Bayt Al Hikmah Vol No 1, January – June 2027

Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia pada Masa Orde Baru dan Reformasi

Ratri Wulandari [1]*

[1] Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo: ratriwulandari1905@gmail.com

Abstract

Urgensi penelitian ini adalah pentingnya mengkaji pola dan kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru dan Reformasi untuk memahami perubahan, kesinambungan, serta pengaruh kebijakan politik terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh dinamika kebijakan pemerintah. Masa Orde Baru dan era Reformasi merupakan dua periode yang memiliki karakteristik berbeda dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pendidikan Islam pada masa Orde Baru, mengkaji kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru dan Reformasi, serta membandingkan perkembangan pendidikan Islam pada kedua periode tersebut. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif melalui kajian terhadap berbagai buku, jurnal, dan dokumen yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam pada masa Orde Baru berkembang melalui sistem yang bersifat sentralistik dengan pemerintah sebagai pengendali utama kebijakan pendidikan. Era Reformasi ditandai dengan penerapan desentralisasi, peningkatan mutu pendidikan, serta penguatan peran madrasah dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Perubahan kebijakan tersebut memberikan kontribusi terhadap perkembangan pendidikan Islam yang lebih adaptif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keywords: *Kebijakan Pendidikan, Orde Baru, Pendidikan Islam, Reformasi*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan bangsa karena berperan dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan spiritual peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki posisi yang strategis karena berfungsi mengembangkan ilmu pengetahuan sekaligus menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat (Amelia et al., 2026). Pendidikan Islam dalam perkembangannya tidak berdiri terpisah dari perubahan sosial dan kebijakan pemerintah, melainkan terus mengalami penyesuaian sesuai dengan dinamika masyarakat dan sistem pendidikan nasional (Tabi'in et al., 2022; Selamet et al., 2023). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan Islam perlu dipahami tidak hanya dari aspek kelembagaan, tetapi juga dari kebijakan yang membentuk arah penyelenggaraan pendidikan pada setiap periode pemerintahan.

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika politik nasional. Dua periode yang memberikan pengaruh besar adalah masa Orde Baru dan era Reformasi. Pada masa Orde Baru, sistem pendidikan dikelola secara sentralistik sehingga kebijakan pendidikan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam konteks pendidikan Islam,

https://doi.org/10.54065/BaytAl-Hikmah.812

kebijakan pemerintah pada periode tersebut turut memengaruhi kedudukan dan perkembangan madrasah dalam sistem pendidikan nasional (Anwar & Marlina, 2019). Salah satu kebijakan penting adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 1975 yang memberikan penguatan terhadap kedudukan madrasah dalam sistem pendidikan nasional (Republik Indonesia, 1975; Ristanti et al., 2020). Kebijakan tersebut menjadi bagian penting dari proses integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional.

Perubahan kebijakan pada masa Orde Baru tidak hanya berkaitan dengan kedudukan madrasah, tetapi juga dengan arah penyelenggaraan pendidikan Islam secara lebih luas. Pendidikan Islam pada periode tersebut berkembang dalam kondisi kebijakan yang bersifat terpusat, sementara lembaga pendidikan perlu menyesuaikan penyelenggaraan pendidikannya dengan kebijakan nasional. Kajian mengenai pendidikan Islam pada periode pemerintahan yang berbeda menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki hubungan erat dengan perubahan arah pendidikan Islam di Indonesia (Salsabila et al., 2021; Nirmala, 2024). Dengan demikian, masa Orde Baru dapat dipandang sebagai periode penting dalam proses penguatan posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

Sebaliknya, era Reformasi membawa perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penerapan desentralisasi dan pemberian kewenangan yang lebih luas kepada daerah serta satuan pendidikan. Perubahan tersebut memberikan ruang yang lebih besar bagi lembaga pendidikan Islam untuk mengembangkan kurikulum, tata kelola, dan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan pendidikan Islam setelah Reformasi menunjukkan adanya perubahan dari pola pengelolaan yang lebih terpusat menuju pola yang memberikan ruang lebih luas bagi pengembangan lembaga pendidikan (Maliki et al., 2022). Perubahan tersebut juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menempatkan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional (Republik Indonesia, 2003; Ristanti et al., 2020).

Perkembangan pendidikan Islam pada era Reformasi juga terlihat pada penguatan penyelenggaraan pendidikan di madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam lainnya. Sistem penyelenggaraan pendidikan Islam pada era Reformasi berkembang dalam berbagai bentuk, baik di sekolah umum, madrasah, pondok pesantren, maupun majelis taklim (Selvia, 2024). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya mengalami perubahan dalam aspek kelembagaan, tetapi juga dalam pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. Perkembangan kurikulum pendidikan Islam pada lembaga madrasah dan pondok pesantren semakin diarahkan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan pendidikan dan kebutuhan masyarakat (Qudus et al., 2023; Sholeh et al., 2023).

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam juga mengalami transformasi pada era Reformasi. Transformasi tersebut terlihat dari berkembangnya fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mempertahankan tradisi keagamaan, tetapi juga menyesuaikan diri dengan tuntutan pendidikan dan perkembangan masyarakat (Musaddad, 2023). Perkembangan pendidikan Islam di pesantren juga berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan perubahan pola pembelajaran (Farhan et al., 2025). Transformasi digital dalam pendidikan pesantren menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan karakteristik pendidikan Islam (Hasan et al., 2023).

Pada sisi lain, pengembangan pembelajaran inovatif dan keterampilan abad ke-21 juga menjadi bagian dari tuntutan peningkatan kualitas pembelajaran pada lingkungan pendidikan (Palennari et al., 2023). Beberapa penelitian terdahulu telah membahas perkembangan pendidikan Islam berdasarkan periode dan aspek tertentu (Hendrizal et al., 2024). Kajian mengenai kebijakan pendidikan Islam di Indonesia juga membahas perkembangan kebijakan dari masa kolonial hingga era Reformasi (Cahyanti, 2021). Penelitian mengenai kebijakan pendidikan Islam pada awal era Reformasi menunjukkan bahwa perubahan arah kebijakan mulai terlihat setelah kondisi politik dan keamanan lebih stabil, terutama melalui lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 (Maghfuri, 2020).

Penelitian lain membahas implikasi pendidikan Islam pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi sehingga memberikan gambaran mengenai perubahan pendidikan Islam lintas periode pemerintahan (Salsabila et al., 2021). Kajian mengenai pendidikan Islam pada masa modern juga membahas kebijakan pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi terhadap perkembangan pendidikan Islam (Nirmala, 2024). Sementara itu, penelitian mengenai kebijakan pendidikan Islam pasca-Reformasi lebih menekankan arah kebijakan pendidikan Islam setelah perubahan sistem pemerintahan (Maliki et al., 2022; Ulum, 2023).

Penelitian terdahulu juga menunjukkan perhatian terhadap aspek kelembagaan dan perkembangan pendidikan Islam pada era Reformasi. Kajian mengenai sistem penyelenggaraan pendidikan Islam membahas perkembangan pendidikan Islam di sekolah umum, madrasah, pondok pesantren, dan majelis taklim (Selvia, 2024). Penelitian mengenai pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional menyoroti kedudukan pendidikan Islam dalam kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Ristanti et al., 2020). Di sisi lain, kajian mengenai pesantren lebih banyak menyoroti transformasi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dan perubahan yang terjadi dalam menghadapi perkembangan masyarakat serta teknologi (Musaddad, 2023; Hasan et al., 2023). Kajian mengenai kurikulum juga menunjukkan adanya perubahan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam pada lembaga madrasah dan pondok pesantren dalam menghadapi perkembangan era digital (Qudus et al., 2023; Sholeh et al., 2023).

Meskipun sejumlah penelitian tersebut telah membahas kebijakan, kelembagaan, kurikulum, dan transformasi pendidikan Islam, masih terdapat ruang untuk memperjelas perbandingan pola dan kebijakan pendidikan Islam antara masa Orde Baru dan era Reformasi secara terpadu. Sebagian penelitian terdahulu berfokus pada kebijakan tertentu, perkembangan pendidikan Islam pada periode tertentu, kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, atau transformasi lembaga pendidikan Islam (Anwar et al., 2019; Ristanti et al., 2020; Maliki et al., 2022; Selvia, 2024). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang secara khusus menghubungkan perubahan pola penyelenggaraan pendidikan Islam dengan perubahan kebijakan pemerintah pada kedua periode tersebut, sehingga perbedaan karakteristik pendidikan Islam pada masa Orde Baru dan Reformasi dapat dipahami secara lebih sistematis.

Berdasarkan *gap* tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menganalisis dan membandingkan pola serta kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru dan era Reformasi dalam satu kajian yang terpadu, dengan memperhatikan perubahan dari sistem yang bersifat sentralistik menuju sistem yang lebih desentralistik serta implikasinya

terhadap perkembangan madrasah dan pesantren. Kajian ini tidak hanya melihat perubahan kebijakan pada masing-masing periode, tetapi juga menghubungkan perubahan tersebut dengan perkembangan kelembagaan, kurikulum, mutu pendidikan, dan proses pembelajaran dalam pendidikan Islam. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pendidikan Islam pada masa Orde Baru, mengkaji kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru dan Reformasi, serta membandingkan karakteristik kedua periode tersebut dalam perspektif perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada analisis pola dan kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru dan era Reformasi berdasarkan berbagai sumber tertulis yang relevan. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh informasi mengenai perkembangan pendidikan Islam, kebijakan pemerintah, perubahan kelembagaan, serta perkembangan penyelenggaraan pendidikan Islam pada kedua periode tersebut melalui penelaahan berbagai literatur yang tersedia.

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber tertulis yang berkaitan dengan pendidikan Islam pada masa Orde Baru dan Reformasi, meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur yang digunakan mencakup kajian mengenai sejarah dan perkembangan pendidikan Islam, kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam, kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, serta perkembangan pendidikan Islam pada masa Reformasi (Anwar & Marlina, 2019; Salsabila et al., 2021). Sumber yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan Islam pasca-Reformasi dan perkembangan lembaga pendidikan Islam juga digunakan untuk memperkuat analisis terhadap perubahan penyelenggaraan pendidikan pada periode tersebut (Maliki et al., 2022; Nirmala, 2024; Selvia, 2024).

Unit analisis dalam penelitian ini bukan berupa responden atau subjek penelitian lapangan, melainkan dokumen dan literatur yang memuat informasi mengenai pola serta kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru dan Reformasi. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian, relevansi terhadap periode yang dikaji, serta keterkaitannya dengan aspek kebijakan, kelembagaan, kurikulum, dan proses pembelajaran pendidikan Islam. Sumber primer berupa dokumen kebijakan dan peraturan pemerintah digunakan untuk memperoleh informasi mengenai landasan kebijakan pendidikan Islam, khususnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Republik Indonesia, 1975; Republik Indonesia, 2003). Sementara itu, artikel jurnal dan buku digunakan sebagai sumber pendukung untuk memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap perkembangan pendidikan Islam pada kedua periode tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, membaca, mencatat, mengelompokkan, dan menelaah informasi yang terdapat dalam sumber-sumber yang relevan. Informasi yang dikumpulkan difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu karakteristik pola pendidikan Islam pada masa Orde Baru, kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam, perkembangan madrasah dan

pesantren, perubahan penyelenggaraan pendidikan pada era Reformasi, serta perbedaan pola dan kebijakan pendidikan Islam antara kedua periode (Qudus et al., 2023). Literatur mengenai perkembangan kurikulum, transformasi pesantren, dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan juga digunakan untuk memahami perubahan pendidikan Islam pada era Reformasi (Sholeh et al., 2023; Musaddad, 2023; Hasan et al., 2023).

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, pengelompokan informasi berdasarkan tema penelitian, interpretasi terhadap informasi yang telah dikelompokkan, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap pengelompokan, data diklasifikasikan berdasarkan periode pemerintahan dan aspek pendidikan yang dikaji, yaitu pola pendidikan, kebijakan pendidikan, perkembangan madrasah dan pesantren, serta perubahan dalam proses pembelajaran. Data mengenai masa Orde Baru dan era Reformasi kemudian dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta perubahan arah kebijakan pendidikan Islam pada kedua periode tersebut. Hasil perbandingan digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan pendidikan Islam dari sistem yang lebih sentralistik menuju penyelenggaraan yang lebih desentralistik dan terbuka.

Tahap akhir analisis dilakukan dengan menginterpretasikan hubungan antara perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan pendidikan Islam pada kedua periode. Interpretasi tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi kedudukan madrasah dan pesantren, pengembangan kurikulum, peningkatan mutu pendidikan, serta perkembangan proses pembelajaran. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik pendidikan Islam pada masa Orde Baru dan era Reformasi serta perubahan yang terjadi di antara kedua periode tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Pola Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru

Masa Orde Baru merupakan periode penting dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia karena pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap lembaga pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan pada masa ini diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional melalui sistem pendidikan yang terpusat. Pola tersebut menunjukkan kuatnya peran pemerintah pusat dalam menentukan arah penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam aspek kelembagaan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam (Anwar et al., 2019).

Pola pendidikan Islam pada masa Orde Baru ditandai dengan kuatnya sistem sentralisasi. Madrasah tetap mempertahankan ciri khas pendidikan agama, tetapi secara bertahap menyesuaikan diri dengan kebijakan pendidikan nasional melalui pengembangan komposisi mata pelajaran agama dan umum. Penyesuaian tersebut memperkuat posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional dan memberikan ruang bagi lulusan madrasah untuk memperoleh akses pendidikan yang lebih luas (Ristanti et al., 2020). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Baru tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang berupaya mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional.

Selain madrasah, pesantren juga mengalami perkembangan dengan tetap mempertahankan karakteristiknya sebagai lembaga pendidikan Islam. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya proses penyesuaian lembaga pendidikan Islam terhadap kebutuhan pendidikan dan perubahan masyarakat. Transformasi pesantren kemudian berkembang lebih lanjut pada era Reformasi melalui penguatan fungsi pendidikan, pengembangan kelembagaan, serta penyesuaian terhadap tuntutan masyarakat (Musaddad, 2023).

Secara umum, pola pendidikan Islam pada masa Orde Baru menunjukkan adanya proses penguatan kedudukan madrasah dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Meskipun penyelenggaraan pendidikan berada dalam kerangka kebijakan yang terpusat, berbagai kebijakan pada periode tersebut menjadi bagian dari proses perkembangan pendidikan Islam pada periode berikutnya. Kajian mengenai pendidikan Islam pada masa Orde Baru menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pemerintah memiliki hubungan dengan perkembangan pendidikan Islam pada periode tersebut (Nirmala, 2024).

Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru

Kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru diarahkan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih terstruktur serta mendukung pembangunan nasional (Nirmala, 2024). Pemerintah memiliki peran besar dalam pengawasan dan pembinaan lembaga pendidikan, termasuk madrasah. Kebijakan tersebut memberikan pengaruh terhadap perkembangan pendidikan Islam, terutama dalam aspek kelembagaan dan kurikulum.

Salah satu kebijakan yang penting adalah diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 1975. Kebijakan tersebut memperkuat kedudukan madrasah dalam sistem pendidikan nasional dan mendorong penyesuaian antara pendidikan agama dan pendidikan umum (Republik Indonesia, 1975). Melalui kebijakan tersebut, madrasah memperoleh kedudukan yang lebih kuat dalam sistem pendidikan nasional (Ristanti et al., 2020). Kebijakan ini menjadi salah satu tahap penting dalam proses integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional.

Perkembangan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam pada masa Orde Baru mengalami perubahan kelembagaan yang cukup penting. Madrasah tidak hanya diposisikan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan agama, tetapi juga semakin terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Perubahan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kebijakan pemerintah dan perkembangan kelembagaan pendidikan Islam (Salsabila et al., 2021).

Pemerintah juga melakukan berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan melalui pembinaan kelembagaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan tersebut menjadi dasar bagi perkembangan pendidikan Islam pada periode berikutnya (Ristanti et al., 2020). Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru dapat dipahami sebagai fase penting dalam proses penguatan kelembagaan dan integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional.

Pola Pendidikan Islam pada Masa Reformasi

Era Reformasi membawa perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia. Perubahan sistem pemerintahan dari pola yang lebih sentralistik menuju desentralistik memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dalam mengembangkan penyelenggaraan pendidikan

ISSN 3090-5133

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan pendidikan Islam setelah Reformasi menunjukkan adanya perubahan dalam pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan Islam (Maliki et al., 2022).

Perkembangan madrasah pada era Reformasi menunjukkan semakin kuatnya kedudukan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Perubahan tersebut terlihat pada pengembangan kelembagaan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Pendidikan Islam pada era Reformasi juga berkembang dalam berbagai bentuk penyelenggaraan, baik melalui sekolah umum, madrasah, pondok pesantren, maupun majelis taklim (Selvia, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan Islam semakin beragam dan memiliki ruang yang lebih luas untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.

Pesantren juga mengalami transformasi yang cukup besar. Selain mempertahankan tradisi pendidikan keagamaan, pesantren mengembangkan berbagai bentuk pendidikan dan menyesuaikan penyelenggaraannya dengan tuntutan masyarakat. Transformasi tersebut menunjukkan kemampuan pesantren dalam mempertahankan karakteristik pendidikan Islam sekaligus beradaptasi dengan perubahan sosial dan perkembangan pendidikan (Musaddad, 2023).

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi bagian dari perkembangan pendidikan Islam pada era Reformasi. Transformasi digital dalam pendidikan pesantren menunjukkan adanya penyesuaian lembaga pendidikan Islam terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pembelajaran (Hasan et al., 2023). Perkembangan tersebut berjalan seiring dengan pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang lebih inovatif serta berorientasi pada keterampilan abad ke-21 (Palennari et al., 2023).

Secara keseluruhan, pola pendidikan Islam pada era Reformasi menunjukkan karakter yang lebih terbuka dan memberikan ruang lebih luas bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan kualitas pembelajaran. Perubahan tersebut menjadi bagian dari proses transformasi pendidikan Islam yang berlangsung melalui perkembangan kelembagaan, kurikulum, teknologi, dan peningkatan kualitas pembelajaran (Sholeh et al., 2023).

Pendidikan Islam pada Masa Reformasi

Perubahan sistem pemerintahan pada era Reformasi berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan nasional, termasuk pendidikan Islam. Pemerintah mulai memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dan satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Perubahan tersebut berkaitan dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan otonomi lembaga, peningkatan profesionalisme tenaga pendidik, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan (Ulum, 2023).

Salah satu regulasi yang menjadi landasan penting adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Regulasi tersebut menempatkan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan memperkuat kedudukan lembaga pendidikan Islam dalam penyelenggaraan pendidikan nasional (Republik Indonesia, 2003; Ristanti et al., 2020). Perkembangan kebijakan tersebut menjadi bagian dari proses penguatan posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional pada era Reformasi.

Pada era Reformasi, kebijakan pendidikan Islam juga diarahkan pada peningkatan mutu pembelajaran, pengembangan kurikulum, penguatan pendidikan karakter, dan pemanfaatan teknologi informasi. Kurikulum pendidikan Islam semakin diarahkan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Pengembangan kurikulum pada madrasah dan pondok pesantren dalam era digital menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan pendidikan Islam dengan perubahan lingkungan pendidikan (Qudus et al., 2023).

Peningkatan kualitas pembelajaran juga berkaitan dengan tuntutan terhadap pengembangan kompetensi dan keterampilan abad ke-21. Pembelajaran inovatif menjadi salah satu bagian dari upaya meningkatkan kualitas proses pendidikan dan menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan kebutuhan peserta didik (Palennari et al., 2023). Dengan demikian, perubahan kebijakan pendidikan Islam pada era Reformasi tidak hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan, tetapi juga mencakup pengembangan kurikulum, pembelajaran, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi.

Kebijakan pendidikan Islam pada era Reformasi memperlihatkan perubahan yang lebih terbuka dibandingkan dengan masa Orde Baru. Pemerintah tidak hanya memperkuat aspek kelembagaan, tetapi juga memberikan ruang bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan inovasi dalam pengelolaan dan pembelajaran. Perubahan arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam terus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan pendidikan pada masa Reformasi (Sutrisno et al., 2025).

Perbandingan Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru dan Reformasi

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan adanya perubahan antara masa Orde Baru dan era Reformasi. Perbedaan tersebut terlihat pada pola penyelenggaraan, arah kebijakan, serta ruang pengembangan lembaga pendidikan. Pada masa Orde Baru, penyelenggaraan pendidikan berada dalam kerangka kebijakan yang lebih terpusat, sedangkan era Reformasi memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah dan lembaga pendidikan dalam mengembangkan penyelenggaraan pendidikan (Anwar et al., 2019).

Perbedaan tersebut turut memengaruhi perkembangan madrasah dan pesantren. Pada masa Orde Baru, kebijakan lebih banyak diarahkan pada penguatan dan integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional. Sementara itu, era Reformasi memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan kelembagaan, kurikulum, mutu pendidikan, dan inovasi pembelajaran (Selvia, 2024). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan Islam berlangsung secara bertahap sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah pada masing-masing periode.

Perubahan juga terlihat dalam pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. Pada masa Orde Baru, pengembangan pendidikan Islam berlangsung dalam kerangka kebijakan yang lebih terpusat. Pada era Reformasi, pengembangan kurikulum dan pembelajaran semakin diarahkan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat (Qudus et al., 2023). Pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan pembelajaran inovatif juga menjadi bagian dari perubahan pendidikan Islam pada era Reformasi (Hasan et al., 2023).

Berdasarkan perbandingan tersebut, kedua periode memiliki kontribusi terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Masa Orde Baru menjadi bagian penting dalam proses penguatan dan integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional, sedangkan era Reformasi melanjutkan perkembangan tersebut melalui kebijakan yang lebih terbuka, desentralistik, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan (Salsabila et al., 2021; Maliki et al., 2022; Ulum, 2023). Dengan demikian, perkembangan pendidikan Islam pada masa kini dapat dipahami sebagai proses transformasi kebijakan dan kelembagaan yang berlangsung secara berkesinambungan dari masa Orde Baru menuju era Reformasi.

Kesimpulan

Pendidikan Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah pada setiap periode pemerintahan. Pada masa Orde Baru, penyelenggaraan pendidikan Islam berlangsung dalam sistem yang bersifat sentralistik dengan penekanan pada keseragaman kebijakan, integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional, serta penguatan kelembagaan melalui berbagai regulasi pemerintah. Sementara itu, era Reformasi menghadirkan perubahan melalui penerapan desentralisasi, peningkatan mutu pendidikan, penguatan profesionalisme tenaga pendidik, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Perbedaan pola dan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kebijakan pendidikan Islam perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan karakter, pengembangan kompetensi tenaga pendidik, serta pemanfaatan teknologi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan *library research* yang hanya mengandalkan buku, artikel ilmiah, dokumen kebijakan, dan peraturan perundang-undangan sehingga belum menggambarkan pengalaman langsung dari lembaga pendidikan Islam dan para pemangku kepentingan. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengembangkan kajian melalui penelitian lapangan dengan melibatkan madrasah, pesantren, pendidik, dan pemangku kebijakan agar diperoleh gambaran yang lebih empiris mengenai implementasi kebijakan pendidikan Islam pada masa kini.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

Amelia, C., Fadila, L., Aini, N., & Rosiana, W. N. (2026). Pengaruh Kebijakan Pendidikan Islam terhadap Pengembangan Literasi Keagamaan di UPT SMP Negeri 27 Medan. *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(1), 12–22. https://doi.org/10.54065/BaytAl-Hikmah.574

Anwar, S., & Marlina, M. (2019). Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam di Indonesia (zaman Orde Baru dan Reformasi). *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam, 6*(2), 87–91. https://doi.org/10.30599/jpia.v6i2.643

Cahyanti, E. T. (2021). Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia: Masa kolonial hingga masa Reformasi. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 2*(2), 181–197. https://doi.org/10.62775/edukasia.v2i2.47

Farhan, M. A. A., Safei, A. A., & Aripudin, A. (2025). Strategi Pengembangan Wawasan Keislaman Rumah Lingkar Daulat Malaya. *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, *1*(2), 221–232. https://doi.org/10.54065/BaytAl-Hikmah.419

Hasan, M., Taufiq, M., & Elmhemit, H. (2023). Digital transformation of Islamic education in pesantren Madura. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, 18*(2), 211–226. https://doi.org/10.19105/tjpi.v18i2.10535

Hendrizal, H., Fitri, Y., Yanre, M. A., Safitri, A., Maryulis, M., & Nelvi, M. (2024). Transformasi pendidikan Islam di pesantren pada era globalisasi. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, 10*(4), 231–244. https://doi.org/10.36989/didaktik.v10i04.5416

Maghfuri, A. (2020). Analisis kebijakan pendidikan Islam pada awal era Reformasi (1998–2004). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 8*(1), 14–26. https://doi.org/10.30603/tjmpi.v8i1.614

Maliki, P. L., Ansar, A., Lukum, A., Arsyad, A., Djafri, N., & Suking, A. (2022). Arah kebijakan pendidikan Islam pasca Reformasi di Indonesia. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 10*(1), 84–96. https://doi.org/10.30603/tjmpi.v10i1.2510

Musaddad, A. (2023). Transformation of Islamic boarding schools as Islamic education institutions in Indonesia. *Journal of Islamic Education Research, 4*(1), 73–82. https://doi.org/10.35719/jier.v4i1.319

Nirmala, Z. (2024). Analisis pendidikan Islam zaman modern: Studi kritis tentang kebijakan pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi terhadap pendidikan Islam. *Murabby: Jurnal Pendidikan Islam, 7*(1), 22–35. https://doi.org/10.15548/MRB.V7I1.3464

Palennari, M., Rachmawaty, R., Saparuddin, S., Saleh, A. R., & Jamaluddin, A. B. (2023). Pelatihan pembelajaran inovatif abad 21 bagi guru SMP Negeri 2 Galesong Utara. *Jurnal IPMAS, 3*(2), 66–74. https://doi.org/10.54065/ipmas.3.2.2023.272

Qudus, A. A., Suryadi, A., Zamakhsari, A., & Paramansyah, A. (2023). Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam pada lembaga pendidikan madrasah dan pondok pesantren dalam era digital. *Jurnal Tahsinia, 4*(2), 219–229. https://doi.org/10.57171/jt.v4i2.516

Republik Indonesia. (1975). *Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Nomor 6 Tahun 1975 dan Nomor 037/U/1975 tentang Peningkatan Mutu Madrasah*.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Ristanti, O., Suri, A., Choirrudin, C., & Dinanti, L. K. (2020). Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional: Telaah terhadap UU No. 20 Tahun 2003. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam, 13*(2), 152–159. https://doi.org/10.32832/tawazun.v13i2.2826

Salsabila, S. S., Ichsan, Y., Rohmadani, A. I., & Mahmudah, S. R. (2021). Implikasi pendidikan Islam di Indonesia pada zaman Orde Lama, Baru, dan Reformasi. *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam, 8*(2), 8–15. https://doi.org/10.32923/tarbawy.v8i2.1753

Selamet, S., Supiana, S., & Zaqiah, Q. Y. (2023). Kebijakan pengembangan kurikulum pendidikan Islam (Studi histori dan regulasi di Indonesia). TADBIRUNA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2(2). https://doi.org/10.51192/tadbiruna.v2i2.395

Selvia, N. L. (2024). Sistem penyelenggaraan pendidikan Islam pada era Reformasi: Di sekolah umum, madrasah, pondok pesantren dan majlis taklim. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 8*(2), 792–808. https://doi.org/10.35931/am.v8i2.3465

Sholeh, M. I., Rohman, H., Suwandi, E. A., Akhyak, Efendi, N., & Muhajir, A. (2023). Transformation of Islamic education: A study of changes in the transformation of the education curriculum. *Jurnal Pendidikan Agama Islam, 20*(1), 33–50. https://doi.org/10.14421/jpai.v20i1.6770

Sutrisno, S. A., Arifi, A., & Sabarudin, S. (2025). Politik kebijakan pendidikan agama Islam era Reformasi dalam implementasi UU No. 20 Tahun 2003. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10*(3). https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.32372

Tabi'in, A., Hasibuan, L., & US, K. A. (2022). Pendidikan Islam, perubahan sosial, dan pembangunan di Indonesia. Asatiza: Jurnal Pendidikan, 3(1), 48–59. https://doi.org/10.46963/asatiza.v3i1.469

Ulum, K. (2023). Kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia pasca Reformasi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan, 11*(1), 25–33. https://doi.org/10.26618/equilibrium.v11i1.9274